

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri komunikasi dan media di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital, meningkatnya penggunaan internet, serta bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses. Transformasi digital telah mengubah cara organisasi berkomunikasi dengan publik, dari komunikasi yang bersifat satu arah menjadi komunikasi yang lebih interaktif, partisipatif, dan berbasis platform digital. Dalam kondisi tersebut, organisasi tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu membangun relasi, menjaga kepercayaan publik, serta mengelola reputasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola komunikasi secara strategis menjadi salah satu faktor penting bagi organisasi, baik organisasi bisnis, media, maupun institusi pemerintah, dalam menghadapi dinamika komunikasi publik modern (Cornelissen, 2020; Nurrosyidah, 2022).

Perubahan ekosistem komunikasi juga ditandai dengan meningkatnya peran media digital dan media sosial sebagai saluran utama masyarakat dalam memperoleh informasi. Masyarakat kini tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga menjadi pihak yang aktif memberikan respons, komentar, kritik, bahkan menyebarluaskan informasi kepada jaringan sosialnya. Kondisi ini membuat organisasi perlu memiliki strategi komunikasi yang terencana, responsif, dan adaptif terhadap perubahan perilaku audiens. Dalam konteks komunikasi strategis, organisasi harus mampu memahami karakteristik publik, memilih saluran komunikasi yang tepat, menyusun pesan yang sesuai, serta mengevaluasi dampak komunikasi yang dilakukan. Dengan demikian, komunikasi tidak lagi dipahami sebagai aktivitas teknis semata, melainkan sebagai fungsi manajerial yang berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi (Grunig & Hunt, 1984; Cornelissen, 2020; Suhendri et al., 2025).

Industri komunikasi publik, khususnya dalam sektor pemerintahan dan keamanan, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan industri komunikasi komersial. Jika komunikasi komersial umumnya berorientasi pada pemasaran produk, peningkatan penjualan, dan loyalitas konsumen, maka komunikasi publik pemerintahan lebih menekankan pada pelayanan informasi, transparansi, edukasi masyarakat, serta pembentukan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks ini, institusi pemerintah dituntut untuk mampu menyampaikan informasi secara akurat, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menjadi semakin penting karena publik memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap keterbukaan informasi, terutama ketika informasi tersebut berkaitan dengan pelayanan masyarakat, keamanan, ketertiban, dan kebijakan publik (McQuail, 2010; Botan, 2021).

Salah satu institusi pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam komunikasi publik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polri membutuhkan sistem komunikasi yang profesional dan terintegrasi. Komunikasi publik bagi institusi kepolisian tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi kegiatan atau kebijakan, tetapi juga menjadi sarana membangun legitimasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan hubungan yang lebih dekat antara kepolisian dan publik. Oleh karena itu, praktik komunikasi dalam institusi kepolisian harus dilakukan secara hati-hati, etis, transparan, serta sesuai dengan kepentingan publik (Coombs, 2019; Cornelissen, 2020).

Dalam praktiknya, komunikasi publik kepolisian memiliki tantangan yang kompleks karena berkaitan langsung dengan isu keamanan, penegakan hukum, pelayanan masyarakat, dan peristiwa-peristiwa yang sering kali menjadi perhatian luas. Pada situasi tertentu, institusi kepolisian juga perlu mengelola komunikasi krisis, seperti ketika terjadi peristiwa kriminal, kecelakaan besar, konflik sosial, bencana, atau kasus yang menarik perhatian media. Dalam kondisi tersebut,

kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi menjadi sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman, mengurangi spekulasi, serta menjaga stabilitas opini publik. Oleh sebab itu, pengelolaan komunikasi krisis membutuhkan koordinasi yang baik, pesan yang konsisten, dan penggunaan saluran komunikasi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas (Coombs, 2019)..

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, penggunaan media digital dan media audiovisual menjadi salah satu strategi utama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara efektif. Media audiovisual memiliki keunggulan karena mampu menyampaikan pesan melalui kombinasi gambar, suara, teks, dan narasi visual sehingga informasi menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan memiliki daya jangkau yang lebih luas. Dalam komunikasi modern, video, siaran langsung, dokumentasi kegiatan, berita digital, dan konten media sosial menjadi instrumen penting bagi organisasi dalam membangun kedekatan dengan publik. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki sistem produksi pesan yang terstruktur, profesional, kreatif, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi media masyarakat (McQuail, 2010; Macnamara, 2016).

Pada sektor pemerintahan, penggunaan media audiovisual juga dapat memperkuat fungsi kehumasan dalam menyampaikan informasi kebijakan, pelayanan publik, capaian organisasi, serta edukasi kepada masyarakat. Kehumasan pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung antara institusi dan masyarakat. Melalui komunikasi yang baik, humas pemerintah dapat menjelaskan program kerja, menjawab kebutuhan informasi publik, serta membangun persepsi positif terhadap organisasi. Dalam hal ini, media audiovisual dapat membantu institusi pemerintah menampilkan aktivitas dan pesan organisasi secara lebih konkret, sehingga publik dapat melihat secara langsung bentuk pelayanan, kegiatan, maupun respons institusi terhadap isu tertentu (Lattimore et al., 2012; Macnamara, 2016).

Sebagai bagian dari sistem komunikasi publik Polri, Divisi Humas Polri memiliki peran strategis dalam mengelola informasi, menjalin hubungan dengan media, menyampaikan pesan institusi, serta membangun citra positif Polri di mata masyarakat. Divisi Humas Polri menjadi unit yang berperan penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersifat objektif, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran tersebut menjadi semakin relevan di era digital karena informasi dapat tersebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform. Dengan demikian, Divisi Humas Polri perlu menjalankan fungsi komunikasi secara terencana, responsif, dan profesional agar pesan institusi dapat diterima dengan baik oleh publik (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023; Cornelissen, 2020).

Salah satu media yang mendukung kegiatan komunikasi Divisi Humas Polri adalah Polri TV. Polri TV berfungsi sebagai media audiovisual resmi yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan kepolisian, menyebarkan informasi kepada masyarakat, serta mendukung strategi komunikasi organisasi. Melalui Polri TV, informasi mengenai kegiatan Polri dapat disampaikan dalam bentuk visual yang lebih informatif dan mudah dipahami. Selain itu, Polri TV juga menjadi sarana untuk memperkuat transparansi informasi, memperluas jangkauan komunikasi publik, serta membangun citra institusi melalui penyajian konten yang aktual, edukatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Cornelissen, 2020; Macnamara, 2016).

Keberadaan Polri TV menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya mengandalkan pola komunikasi konvensional, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan media digital dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks komunikasi strategis, Polri TV dapat dipahami sebagai salah satu instrumen komunikasi organisasi yang mengintegrasikan fungsi informasi, dokumentasi, publikasi, edukasi, dan reputasi. Konten yang diproduksi melalui media audiovisual dapat membantu masyarakat memahami berbagai kegiatan kepolisian, mulai dari pelayanan publik, edukasi keselamatan, penanganan kasus, kegiatan sosial, hingga program-program kelembagaan. Dengan demikian, Polri TV

memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui komunikasi yang lebih terbuka dan mudah diakses (Cornelissen, 2020; Macnamara, 2016).

Selain berperan dalam komunikasi eksternal, Polri TV juga memiliki fungsi dalam mendukung komunikasi internal organisasi. Dokumentasi kegiatan, penyebaran informasi internal, serta publikasi program kerja dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi, identitas organisasi, dan pemahaman anggota terhadap arah komunikasi institusi. Komunikasi internal yang baik dapat membantu organisasi membangun kesamaan persepsi, meningkatkan keterlibatan anggota, serta memperkuat budaya organisasi. Oleh karena itu, Polri TV tidak hanya dipahami sebagai media publikasi eksternal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem komunikasi organisasi yang mendukung efektivitas kerja Divisi Humas Polri secara lebih luas (Lattimore et al., 2012; Botan, 2021).

Dalam perspektif *strategic communication*, praktik komunikasi yang dilakukan oleh Polri TV tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan, produksi pesan, pemilihan saluran media, distribusi konten, serta evaluasi komunikasi. Setiap pesan yang disampaikan kepada masyarakat perlu disusun berdasarkan tujuan komunikasi yang jelas, target audiens yang tepat, serta nilai-nilai institusi yang ingin ditampilkan. Hal ini penting karena komunikasi strategis menekankan keterpaduan antara pesan, media, dan tujuan organisasi. Dengan demikian, kegiatan komunikasi Polri TV dapat menjadi ruang pembelajaran yang relevan bagi mahasiswa komunikasi untuk memahami bagaimana teori komunikasi strategis diterapkan dalam praktik kerja profesional di lembaga pemerintah (Cornelissen, 2020; Nurrosyidah, 2022).

Sebagai mahasiswa Program Studi *Strategic Communication* di Universitas Multimedia Nusantara, penulis memiliki ketertarikan untuk mempelajari secara langsung bagaimana strategi komunikasi diterapkan dalam organisasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap publik. Penulis menyadari bahwa kompetensi komunikasi strategis tidak cukup hanya dipahami melalui teori di

ruang kelas, tetapi juga perlu dikembangkan melalui pengalaman praktis di lingkungan kerja profesional. Melalui kegiatan magang, mahasiswa dapat memahami dinamika kerja komunikasi, proses produksi pesan, koordinasi tim, penggunaan media digital, serta tantangan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara tepat dan efektif (Kolb, 1984; Cornelissen, 2020).

Pemilihan Divisi Humas Polri TV sebagai tempat pelaksanaan magang didasarkan pada relevansi bidang kerja lembaga tersebut dengan keilmuan *strategic communication*. Polri TV memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempelajari proses komunikasi organisasi, produksi konten audiovisual, penyusunan pesan publik, dokumentasi kegiatan, serta strategi publikasi informasi institusi. Selain itu, lingkungan kerja Polri TV juga memungkinkan penulis untuk memahami bagaimana media digunakan sebagai sarana membangun citra, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pengalaman ini menjadi penting karena dunia kerja komunikasi saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks organisasi yang nyata (Macnamara, 2016; Nurrosyidah, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kegiatan magang di Divisi Humas Polri TV dipandang sebagai langkah yang tepat untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan penulis dalam bidang komunikasi strategis. Melalui kegiatan magang ini, penulis berharap dapat memperoleh pengalaman praktis mengenai proses kerja komunikasi publik, produksi media audiovisual, pengelolaan pesan organisasi, serta strategi komunikasi yang diterapkan dalam institusi pemerintah. Selain itu, kegiatan magang ini juga diharapkan dapat memperkuat kesiapan penulis dalam menghadapi dunia kerja profesional, khususnya sebagai calon praktisi komunikasi yang mampu bekerja secara kreatif, etis, adaptif, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik (Cornelissen, 2020; Suhendri et al., 2025).

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja

Kegiatan magang yang dilaksanakan oleh penulis di Divisi Humas Polri TV memiliki maksud untuk memberikan pengalaman langsung kepada penulis sebagai mahasiswa Program Studi Strategic Communication dalam memahami praktik kerja komunikasi di lingkungan institusi pemerintah. Melalui kegiatan magang ini, penulis memperoleh kesempatan untuk mengamati, mempelajari, serta terlibat secara langsung dalam proses kerja komunikasi organisasi, khususnya dalam bidang kehumasan, produksi media audiovisual, publikasi informasi, dan pengelolaan pesan kepada publik.

Pelaksanaan kerja magang ini juga dimaksudkan sebagai sarana bagi penulis untuk menghubungkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktik kerja nyata di dunia profesional. Dalam bidang komunikasi strategis, pemahaman teoritis mengenai komunikasi organisasi, hubungan masyarakat, manajemen media, serta penyusunan pesan komunikasi perlu didukung dengan pengalaman praktis agar mahasiswa mampu memahami dinamika kerja secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, kegiatan magang menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran karena memberikan ruang bagi penulis untuk mengembangkan wawasan, keterampilan, serta sikap profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Selain itu, kegiatan magang di Divisi Humas Polri TV juga bertujuan untuk memperkenalkan penulis pada sistem kerja komunikasi di institusi kepolisian, terutama dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media audiovisual dan digital. Sebagai media yang berada di bawah Divisi Humas Polri, Polri TV memiliki peran dalam mendukung penyebaran informasi, dokumentasi kegiatan, serta penguatan citra institusi melalui konten yang informatif dan relevan. Melalui pengalaman tersebut, penulis dapat memahami bagaimana komunikasi strategis diterapkan dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap publik.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan pembelajaran yang telah diperoleh selama perkuliahan di Universitas Multimedia Nusantara, khususnya dalam bidang komunikasi strategis, komunikasi organisasi, hubungan masyarakat, dan media digital.
2. Memahami proses kerja yang berlaku di lingkungan Divisi Humas Polri TV, termasuk sistem kerja, alur komunikasi, koordinasi antarbagian, serta mekanisme produksi dan publikasi informasi.
3. Mempelajari peran media audiovisual dalam mendukung kegiatan komunikasi publik, khususnya dalam menyampaikan informasi institusi, mendokumentasikan kegiatan, serta membangun citra positif organisasi.
4. Mengetahui bagaimana strategi komunikasi digunakan dalam lingkungan instansi pemerintah, terutama dalam penyusunan pesan, pemilihan saluran komunikasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
5. Mengembangkan keterampilan teknis yang berkaitan dengan bidang komunikasi, seperti pengelolaan konten, dokumentasi kegiatan, penyusunan materi publikasi, serta pemahaman terhadap proses produksi media.
6. Mengembangkan kemampuan soft skills yang dibutuhkan dalam dunia kerja, antara lain kemampuan komunikasi interpersonal, kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan manajemen waktu, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta kemampuan bertanggung jawab dan bersikap profesional.
7. Meningkatkan kesiapan penulis dalam menghadapi dunia kerja profesional, khususnya di bidang komunikasi strategis, kehumasan, media, dan publikasi informasi.

Melalui pencapaian tujuan tersebut, kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam mengembangkan kompetensi akademik maupun profesional. Pengalaman yang diperoleh selama menjalani magang di

Divisi Humas Polri TV diharapkan mampu memperkuat pemahaman penulis mengenai praktik komunikasi strategis di lingkungan kerja nyata, sekaligus menjadi bekal dalam menghadapi tantangan industri komunikasi di masa depan.

1.3 Deskripsi Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja

Kegiatan kerja magang dilaksanakan oleh penulis di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Mabes Polri, tepatnya pada Divisi Hubungan Masyarakat Polri, khususnya di subbagian Polri TV. Polri TV merupakan unit kerja yang berperan dalam mendukung kegiatan komunikasi publik melalui media audiovisual dan media digital. Dalam pelaksanaannya, Polri TV memiliki tanggung jawab dalam memproduksi, mengelola, serta menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok.

Sebagai mahasiswa Program Studi Strategic Communication, kegiatan magang ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memahami secara langsung proses kerja komunikasi strategis di lingkungan instansi pemerintah. Penulis tidak hanya mempelajari bagaimana informasi diproduksi dan dipublikasikan, tetapi juga memahami bagaimana media digital digunakan sebagai sarana komunikasi untuk membangun citra, menyampaikan pesan institusi, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pengalaman praktis mengenai pengelolaan konten digital, produksi media sosial, serta dukungan teknis dalam kegiatan penyiaran.

Selama pelaksanaan kerja magang, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan publikasi konten Polri TV. Tugas-tugas yang dilakukan meliputi pembuatan thumbnail YouTube, pengunggahan video ke kanal YouTube Polri TV, pemotongan video reels untuk Instagram dan TikTok, pembuatan thumbnail reels, pengunggahan reels Instagram dan TikTok, pembuatan serta pengeditan feeds Instagram, pengunggahan feeds Instagram Polri TV, pembuatan thumbnail untuk beberapa segmen khusus, membantu proses

dubbing video, serta membantu tim asisten produser dalam menjalankan prompter saat presenter melakukan siaran atau on air.

Pelaksanaan tugas-tugas tersebut memberikan pengalaman langsung kepada penulis dalam memahami alur kerja media digital dan produksi konten audiovisual. Penulis belajar bahwa setiap konten yang dipublikasikan melalui media sosial dan platform digital perlu melalui proses perencanaan, penyesuaian visual, pengeditan, pemeriksaan, serta publikasi yang sesuai dengan arahan tim. Selain itu, penulis juga memahami pentingnya ketelitian, kreativitas, koordinasi, dan tanggung jawab dalam mendukung kegiatan komunikasi publik di lingkungan Divisi Humas Polri TV.

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja

Kegiatan magang dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu dimulai pada tanggal 18 Februari hingga 29 Mei. Selama periode tersebut, penulis melaksanakan kegiatan kerja secara langsung di kantor Mabes Polri dengan sistem Work From Office atau WFO. Sistem kerja ini memungkinkan penulis untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas kerja harian di lingkungan Divisi Humas Polri TV, sehingga penulis dapat memahami dinamika kerja, koordinasi tim, serta proses produksi dan publikasi konten secara nyata.

Dalam pelaksanaan kegiatan magang, penulis mengikuti jadwal kerja yang telah ditentukan oleh pihak instansi. Jadwal kerja tersebut diterapkan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Polri TV, khususnya dalam pengelolaan konten media digital dan kegiatan produksi audiovisual. Adapun ketentuan waktu kerja selama kegiatan magang adalah sebagai berikut.

Adapun jadwal kerja yang berlaku selama kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- **Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan magang dilaksanakan di Mabes Polri, Divisi Humas Polri, subbagian Polri TV.

- **Periode Pelaksanaan**

Kegiatan magang dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari hingga 29 Mei.

- **Sistem Kerja**

Sistem kerja yang diterapkan adalah Work From Office atau WFO.

- **Hari Kerja**

Hari kerja yang berlaku selama kegiatan magang adalah Selasa hingga Jumat.

- **Durasi Kerja**

Durasi kerja yang dijalani penulis adalah minimal 8 jam kerja per hari.

- **Sistem Jadwal Kerja**

Jadwal kerja dilaksanakan dengan sistem shift sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri TV.

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja, penulis mengikuti sistem shift kerja yang telah ditetapkan oleh pihak instansi. Sistem shift tersebut diterapkan agar kegiatan komunikasi, produksi konten, penyuntingan, serta publikasi media digital dapat berjalan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun pembagian shift kerja selama kegiatan magang adalah sebagai berikut.

- **Shift Pagi**

Shift pagi dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB.

- **Shift Siang**

Shift siang dilaksanakan pada pukul 12.00 sampai dengan 21.00 WIB.

Melalui sistem kerja tersebut, penulis belajar untuk mengelola waktu secara lebih efektif, meningkatkan kedisiplinan, serta menyesuaikan diri dengan ritme kerja di bidang komunikasi dan media. Sistem shift juga memberikan pemahaman kepada penulis bahwa pekerjaan di bidang media digital dan audiovisual membutuhkan fleksibilitas, ketepatan waktu, dan kesiapan untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan produksi maupun publikasi konten.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja

Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari proses administrasi, penerimaan, pengenalan lingkungan kerja, pelaksanaan tugas, hingga penyusunan laporan magang. Setiap tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan magang berjalan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari pihak Universitas Multimedia Nusantara maupun pihak Divisi Humas Polri TV.

Tahap pertama yang dilakukan penulis adalah mempersiapkan dokumen administrasi magang dari pihak kampus. Dokumen tersebut digunakan sebagai kelengkapan untuk mengajukan permohonan magang kepada instansi tujuan. Setelah dokumen administrasi disiapkan, penulis mengajukan permohonan magang kepada Divisi Humas Polri TV. Permohonan tersebut kemudian diproses oleh pihak instansi hingga penulis dinyatakan diterima sebagai peserta magang.

Setelah diterima sebagai peserta magang, penulis mengikuti tahap pengenalan lingkungan kerja dan pelatihan awal atau training. Pada tahap ini, penulis diperkenalkan dengan lingkungan kerja Divisi Humas Polri TV, sistem kerja, aturan yang berlaku, serta tugas-tugas yang akan dilakukan selama kegiatan magang. Penulis juga memperoleh arahan mengenai alur kerja, etika kerja, koordinasi dengan tim, serta tanggung jawab yang harus dijalankan selama berada di lingkungan kerja.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan tugas kerja secara langsung di Divisi Humas Polri TV. Dalam tahap ini, penulis mulai terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan produksi konten dan publikasi media digital. Penulis membantu membuat thumbnail YouTube, mengunggah video ke kanal YouTube Polri TV, memotong video reels untuk Instagram dan TikTok, membuat thumbnail reels, mengunggah reels ke Instagram dan TikTok, membuat serta mengedit feeds Instagram, dan mengunggah feeds Instagram Polri TV.

Selain itu, penulis juga membantu pembuatan thumbnail untuk beberapa segmen khusus Polri TV, seperti *Presisi Nusantara*, *Kapolri Sepekan*, dan *Polisi Menjawab*. Dalam proses tersebut, penulis menyesuaikan desain thumbnail dengan karakter masing-masing program agar tetap informatif, menarik, dan sesuai dengan identitas visual Polri TV. Tugas ini memberikan pengalaman kepada penulis dalam memahami pentingnya elemen visual dalam menarik perhatian audiens serta memperkuat pesan komunikasi yang ingin disampaikan.

Penulis juga turut membantu tim asisten produser dalam kegiatan produksi audiovisual, seperti membantu pengisian suara atau dubbing video dan membantu menjalankan prompter saat presenter sedang melakukan siaran atau on air. Kegiatan dubbing membantu penulis memahami pentingnya intonasi, kejelasan suara, dan kesesuaian narasi dalam penyampaian pesan melalui video. Sementara itu, kegiatan menjalankan prompter melatih penulis untuk bekerja secara teliti, fokus, dan mampu menyesuaikan ritme teks dengan penyampaian presenter agar proses produksi berjalan lancar.

Selama pelaksanaan kerja magang, penulis menjalankan tugas berdasarkan arahan dari pembimbing lapangan dan tim terkait. Setiap tugas yang diberikan dilakukan dengan memperhatikan ketepatan waktu, kesesuaian format, kualitas visual, serta kebutuhan publikasi. Penulis juga

belajar untuk berkoordinasi dengan anggota tim lain, menerima masukan, melakukan revisi apabila diperlukan, serta memastikan pekerjaan yang dilakukan mendukung kebutuhan komunikasi Polri TV.

Selain menjalankan tugas kerja, penulis juga melakukan pencatatan terhadap kegiatan yang dilakukan selama masa magang. Pencatatan tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan magang dan sebagai bentuk dokumentasi atas pengalaman kerja yang telah diperoleh. Melalui pencatatan ini, penulis dapat merefleksikan tugas-tugas yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, solusi yang diterapkan, serta keterampilan yang berkembang selama mengikuti kegiatan magang.

Tahap terakhir dalam prosedur pelaksanaan kerja magang adalah penyusunan laporan magang. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik penulis kepada pihak universitas atas kegiatan magang yang telah dilaksanakan. Dalam laporan tersebut, penulis menjelaskan latar belakang pelaksanaan magang, maksud dan tujuan kerja magang, waktu dan prosedur pelaksanaan kerja, tugas-tugas yang dilakukan, kendala yang dihadapi, serta pembelajaran yang diperoleh selama menjalani kegiatan magang di Divisi Humas Polri TV.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kerja magang di Divisi Humas Polri TV memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. Kegiatan ini tidak hanya membantu penulis memahami praktik kerja komunikasi publik di lingkungan instansi pemerintah, tetapi juga melatih kemampuan teknis dan nonteknis, seperti kreativitas, ketelitian, komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, kedisiplinan, serta tanggung jawab profesional. Dengan demikian, kegiatan magang ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan penulis untuk menghadapi dunia kerja di bidang komunikasi strategis, media digital, dan kehumasan.